

ABSTRAK

Didalam menjalankan usahanya, suatu perusahaan diwajibkan untuk memotong PPh Pasal 21 terhadap pegawai-pegawainya. Berdasarkan Undang-undang Perpajakan No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21 merupakan pajak yang harus ditanggung oleh pegawai. Tetapi perusahaan dapat melakukan kebijakan untuk menanggung PPh Pasal 21, dengan memilih tiga alternatif kebijakan PPh Pasal 21, yaitu kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan, kebijakan PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak oleh perusahaan dan kebijakan PPh Pasal 21 *digross up*.

Masalah yang diteliti didalam skripsi ini adalah perbandingan antara keempat alternatif kebijakan PPh Pasal 21 tersebut, yaitu :

1. Kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung pegawai.
2. Kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan.
3. Kebijakan PPh Pasal 21 ditunjang oleh perusahaan,dan
4. Kebijakan PPh Pasal 21 *digross up*.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus, yaitu suatu metode yang menggambarkan keadaan PT Pupuk Kujang berdasarkan fakta yang ada pada situasi yang diselidiki, untuk kemudian diolah menjadi informasi, yang selanjutnya dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas permasalahan yang diidentifikasi yang selanjutnya diperoleh suatu kesimpulan. Data-data dikumpulkan dengan cara penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan pada PT Pupuk Kujang, sebuah perusahaan BUMN yang bergerak dibidang pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata PT Pupuk Kujang selama ini menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja/perusahaan. Apabila perusahaan menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung pegawai atau ditunjang oleh perusahaan, atau *digross up*, maka akan ada perbedaan gaji yang dibawa pulang oleh pegawai (*take home pay*) serta selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan PPh Pasal 21 *digross up* lebih menguntungkan dibandingkan dengan Kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung pegawai, ditanggung oleh perusahaan, maupun ditunjang oleh perusahaan, khususnya dalam hal gaji yang dibawa pulang oleh pegawai (*take home pay*). Penulis menyarankan agar PT Pupuk Kujang menerapkan Kebijakan PPh Pasal 21 *digross up*.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Kegunaan Hasil Penelitian.....	3
1.5 Rerangka Pemikiran & Hipotesis.....	4
1.6 Metode Penelitian	8
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar-dasar Perpajakan.....	10
2.1.1 Definisi Pajak.....	10
2.1.2 Fungsi Pajak.....	12
2.1.3 Pengelompokan Pajak.....	13

2.1.4	Teori-teori Pemungutan Pajak.....	15
2.1.5	Asas-asas Pemungutan Pajak.....	17
2.1.6	Asas-asas Pemungutan Pajak lainnya.....	18
2.1.7	Tata Cara Pemungutan Pajak.....	19
2.1.8	Syarat Pemungutan Pajak.....	20
2.1.9	Sistem Pemungutan Pajak.....	21
2.1.10	Hambatan Pemungutan Pajak.....	22
2.1.11	Tarif Pajak.....	23
2.1.12	Cara Menghitung Pajak.....	24
2.1.13	Cara Melunasi Pajak.....	25
2.2	Pajak Penghasilan.....	27
2.2.1	Definisi Pajak Penghasilan.....	27
2.2.2	Subjek Pajak.....	28
2.2.3	Pengecualian Subjek Pajak	30
2.2.4	Objek Pajak	31
2.2.5	Pengecualian Objek Pajak.....	33
2.3	Pajak Penghasilan Pasal 21	36
2.3.1	Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21.....	36
2.3.2	Wajib Pajak PPh Pasal 21.....	36
2.3.3	Objek Pajak PPh Pasal 21.....	38
2.3.4	Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 Final.....	41
2.3.5	Pemotong Pajak PPh Pasal 21.....	42
2.3.6	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.....	44

2.3.7	Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21	48
2.4	Penerapan Kebijakan PPh Pasal 21	49
2.4.1	Alternatif Perhitungan PPh Pasal 21	49
2.4.2	Pajak Penghasilan Terutang	56

BAB III METODE DAN OBJEK PENELITIAN

3.1	Metode Penelitian	58
3.1.1	Sejarah dan perkembangan PT. Pupuk Kujang	58
3.1.2	Struktur Organisasi PT Pupuk Kujang	59
3.1.3	Uraian Tugas Bagian Pajak Pada PT Pupuk Kujang	61
3.2	Metode Penelitian	64
3.2.1	Tehnik Pengumpulan data	65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Data Perusahaan PT Pupuk Kujang	66
4.2	Kebijakan PPh Pasal 21 yang Dijalankan Oleh Perusahaan	68
4.3	Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21	70
4.3.1	Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	60
4.4	Pemilihan Alternatif Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21	84

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan	85
5.2	Saran	86

DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tarif PPh Pasal 21 Orang Pribadi.....	24
Tabel 2.2	Tarif PPh Pasal 21 Badan dalam negeri atau BUT.....	24
Tabel 2.3	Rumus Menghitung Pajak.....	25
Tabel 2.4	Rumus Perhitungan PPh Pasal 21.....	48
Tabel 2.5	Rumus Gross up.....	51
Tabel 2.6	Perhitungan PPh Pasal	21
Tabel 2.7	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	53
Tabel 2.8	PPh Pasal 21 setahun.....	53
Tabel 2.9	Alternatif Kebijakan PPh Pasal 21.....	54
Tabel 2.10	Pemilihan Alternatif Kebijakan PPh Pasal 21.....	55
Tabel 4.1	Daftar Penghasilan Karyawan PT Pupuk Kujang Periode April 2006.....	67
Tabel 4.2	Perhitungan Kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Pegawai.....	73
Tabel 4.3	Perhitungan Kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan.....	76
Tabel 4.4	Perhitungan Kebijakan PPh Pasal 21 Ditunjang Oleh Perusahaan.....	79
Tabel 4.5	Perhitungan Kebijakan PPh Pasal 21 Digross up.....	83
Tabel 4.6	Perhitungan Take Home Pay, Biaya Fiskal, dan Biaya Komersial Sebulan.....	85
Tabel 4.7	Ikhtisar Take Home Pay, Biaya Fiskal, dan Biaya Komersial Sebulan dan Selisihnya.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002 Tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
- Lampiran 2 Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Lampiran 3 Ikhtisar Biaya yang Deductible dan Non Deductible Expenses.
- Lampiran 4 Memo Surat Perintah Kerja Praktek.
- Lampiran 5 Contoh Slip Gaji Karyawan PT Pupuk Kujang.
- Lampiran 6 Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Lampiran 7 Contoh Surat Setoran Pajak.